|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Draf Pengaturan** | | **Penjelasan** | **Tanggapan** |
| C:\Users\Lenovo\Documents\images.jpg  OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA | |  |  |
| SALINAN  PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR: /POJK.05/20..  TENTANG  PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN  PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, | | PENJELASAN  ATAS  PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  NOMOR: … /POJK.05/…  TENTANG  PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN  PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI |  |
| Menimbang : | 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 10 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 40 ayat (6), Pasal 69 ayat (2), dan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; 2. bahwa untuk melaksanakan kewenangan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; 3. bahwa untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing industri dan mendukung perkembangan usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sehingga dapat meningkatkan peran dan kontribusi terhadap perekonomian nasional, diperlukan penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi. | 1. UMUM   Bahwa dengan adanya peningkatan volume usaha, bertambahnya pemanfaatan jasa perasuransian oleh masyarakat, serta layanan jasa perasuransian yang semakin bervariasi sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, diperlukan penyempurnaan pengaturan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sehingga dapat menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum.  Selanjutnya, pemulihan ekonomi dari dampak pandemi *Covid-19* dan dalam menciptakan daya saing dan perkembangan usaha yang dinamis, diperlukan *barrier* yang kuat bagi calon pelaku usaha perasuransian yang ingin masuk ke dalam industri perasuransian.  Saat ini, telah terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, namun demikian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud perlu dilakukan penyempurnaan dalam rangka mencapai tujuan yang akan dicapai.  Penyempurnaan yang dilakukan antara lain mengenai mekanisme pelaporan dan identifikasi kepemilikan asing, peningkatan persyaratan modal disetor pada saat pendirian, mekanisme permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan oleh perusahaan, susunan organisasi, tenaga kerja asing, tenaga ahli, pialang asuransi, pialang reasuransi, dan penilai kerugian asuransi, kantor di luar kantor pusat, agen asuransi, perubahan kepemilikan, pelaporan, penggabungan dan peleburan, *e-*licensing, dan sanksi. |  |
| Mengingat : | 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); |  |  |
|  | 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618); |  |  |
|  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing Pada Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6200); |  |  |
|  | 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing Pada Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6456). |  |  |
| MEMUTUSKAN: | |  |  |
| Menetapkan : | PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI. |  |  |
|  | BAB I |  |  |
|  | KETENTUAN UMUM |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: |  |  |
|  | 1. Perusahaan adalah perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi. |  |  |
|  | 1. Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi, asuransi syariah, penjaminan, penjaminan syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, peserta, atau penerima jaminan. |  |  |
|  | 1. Usaha Pialang Reasuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. |  |  |
|  | 1. Usaha Penilai Kerugian Asuransi adalah usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. |  |  |
|  | 1. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Pialang Asuransi. |  |  |
|  | 1. Perusahaan Pialang Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Pialang Reasuransi. |  |  |
|  | 1. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Penilai Kerugian Asuransi. |  |  |
|  | 1. Pialang Asuransi adalah orang yang bekerja pada Perusahaan Pialang Asuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam melakukan penutupan asuransi atau asuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. |  |  |
|  | 1. Pialang Reasuransi adalah orang yang bekerja pada Perusahaan Pialang Reasuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam melakukan penutupan reasuransi atau reasuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. |  |  |
|  | 1. Modal Disetor:    1. bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah modal disetor; atau 2. bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan wajib. |  |  |
|  | 1. Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. |  |  |
|  | 1. Pengendali adalah Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk:    1. menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan/atau    2. mempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. |  |  |
|  | 1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berberntuk badan hukum koperasi. |  |  |
|  | 1. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi. |  |  |
|  | 1. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi. |  |  |
|  | 1. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. |  |  |
|  | 1. Tenaga Ahli adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan/atau keahlian tertentu di bidang perasuransian dan ditunjuk sebagai Tenaga Ahli pada satu Perusahaan |  |  |
|  | 1. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perusahaan lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan Ekuitas dari Perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perusahaan yang menerima Penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. |  |  |
|  | 1. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Perusahaan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) Perusahaan baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan Ekuitas dari Perusahaan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perusahaan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. |  |  |
|  | 1. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan suatu badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perusahaan yang mengakibatkan timbulnya Pengendali atau Pemegang Saham Pengendali baru atas Perusahaan tersebut. |  |  |
|  | 1. Asosiasi adalah asosiasi dari Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, atau profesi keahlian di lingkup usaha Perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan dan sesuai dengan kegiatan atau jenis usaha dari masing-masing Perusahaan. |  |  |
|  | 1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | BAB II |  |  |
|  | BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN, NAMA PERUSAHAAN, DAN PERMODALAN |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Bagian Kesatu |  |  |
|  | Bentuk Badan Hukum |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | Bentuk badan hukum Perusahaan adalah: |  |  |
|  | 1. perseroan terbatas; atau |  |  |
|  | 1. koperasi. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Bagian Kedua |  |  |
|  | Kepemilikan |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan hanya dapat dimiliki oleh: |  |  |
|  | 1. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau |  |  |
|  | 1. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bersama-sama dengan warga negara asing atau Badan Hukum Asing yang harus merupakan Perusahaan yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis. |  |  |
|  | 1. Kepemilikan Asing pada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian dan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 1. Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan melalui transaksi di bursa efek. | Cukup jelas |  |
|  | 1. Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui: |  |  |
|  | * 1. penyertaan langsung pada Perusahaan; | Cukup Jelas |  |
|  | * 1. transaksi di bursa efek atas Perusahaan; dan/atau | Ketentuan transaksi di bursa efek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. |  |
|  | * 1. penyertaan pada badan hukum Indonesia yang memiliki Perusahaan melalui: |  |  |
|  | 1. penyertaan langsung; atau | Cukup jelas. |  |
|  | 1. transaksi di bursa efek. | Penyertaan badan hukum Indonesia melalui transaksi di bursa efek memperhatikan persentasi kepemilikan yang diperhitungkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.  Misal, persentase kepemilikan yang ada di pasar modal hanya memperhitungkan kepemilikan saham di atas 5%, maka dasar tersebut yang digunakan dalam menghitung kepemilikan asing di pasar modal. |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 1. Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh Badan Hukum Asing melalui penyertaan langsung pada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan penyertaan langsung pada badan hukum Indonesia yang memiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c angka 1), wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: |  |  |
|  | * 1. merupakan perusahaan yang memiliki usaha sejenis atau merupakan perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis; | Yang dimaksud anak perusahaan dalam ayat ini adalah anak perusahaan pada level pertama sampai dengan level kedua.  Yang dimaksud “sejenis” dalam ayat ini seperti perusahaan pialang asuransi sejenis dengan perusahaan pialang asuransi. |  |
|  | * 1. memiliki ekuitas paling sedikit 5 (lima) kali dari jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan pada saat pendirian dan perubahan kepemilikan Perusahaan; dan | Yang dimaksud dengan “ekuitas” adalah ekuitas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.  Yang dimaksud dengan penyertaan langsung pada Perusahaan adalah penyertaan BHA ditinjau dari modal disetor Perusahaan.  Sebagai contoh: Terdapat Kepemilikan Perusahaan Asuransi oleh BHI sebesar 50%, lalu terdapat kepemilikan BHA pada BHI dimaksud sebesar 50%, dapat diartikan BHA memiliki proporsi kepemilikan sebesar 25% pada Perusahaan Asuransi. Maka, komponen perhitungan ekuitas oleh BHA hanya sebesar 25% saja dari besarnya penyertaan langsung pada BHI dimaksud.  (dalam ribuan rupiah)   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Perusahaan | PS Langsung | | | Minimum Ekuitas BHA | | PT A | BHI A | 50% | 100.000 |  | | BHA B | 50% | 100.000 | 500.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Perusahaan | PS Langsung | | | PS Tidak Langsung |  | Minimum Ekuitas BHA | | PT A | BHI A | 50% | 100.000 | BHA C | 50% | 250.000 | | WNI | 50% |  | | BHI B | 50% | 100.000 |  |  |  | |  |
|  | * 1. memiliki *rating* paling rendah A atau yang setara dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Bagi Badan Hukum Asing yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, persyaratan kriteria *rating* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dipenuhi oleh *rating* dari salah satu anak perusahaannya yang bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Kewajiban pemenuhan kriteria Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Kepemilikan Asing melalui penyertaan langsung pada badan hukum Indonesia yang memiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c angka 1) dengan persyaratan memiliki pengendalian terhadap Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung dengan prosentase kepemilikan saham lebih besar sama dengan 25% (dua puluh lima persen). | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Kewajiban pemenuhan kriteria Badan Hukum Asing yang menjadi pemegang saham Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi kepemilikan saham Perusahaan oleh Badan Hukum Asing melalui: | Cukup jelas. |  |
|  | 1. transaksi di bursa efek sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b; dan |  |  |
|  | 1. transaksi di bursa efek atas badan hukum Indonesia yang memiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 1. Perusahaan wajib mengidentifikasi dan melaporkan: |  |  |
|  | 1. Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh Warga Negara Asing secara tidak langsung; dan | Yang dimaksud dengan Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh Warga Negara Asing secara tidak langsung pada ketentuan ini merupakan kepemilikan saham oleh Warga Negara Asing atas Badan Hukum Indonesia yang memiliki Perusahaan (layer kedua dan seterusnya). |  |
|  | 1. pemenuhan kriteria Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, | Cukup jelas. |  |
|  | kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  | 1. Kewajiban identifikasi dan pelaporan Kepemilikan Asing dan pemenuhan kriteria Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi dan usaha bersama. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung secara kumulatif untuk semua cara kepemilikan. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perhitungan kepemilikan saham oleh Badan Hukum Asing secara kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan: |  |  |
|  | * + - * 1. secara langsung, yaitu perhitungan kepemilikan asing merupakan jumlah persentase kepemilikan saham oleh seluruh Badan Hukum Asing yang tercatat dalam anggaran dasar terakhir Perusahaan. | Cukup jelas. |  |
|  | * + - * 1. secara tidak langsung, yaitu: |  |  |
|  | 1. perhitungan Kepemilikan Asing dari pemegang saham Perusahaan berbentuk Badan Hukum Indonesia yang merupakan perseroan tertutup dihitung berdasarkan persentase kumulatif kepemilikan saham oleh seluruh Badan Hukum Asing sampai dengan pemegang saham terakhir (*ultimate shareholders*); atau | Contoh Perhitungan:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nama Perusahaan** | **Derajat Pertama** | **Derajat Kedua** | **Derajat Ketiga** | **Derajat berikutnya..** | | PT Asuransi X | XYX Inc. – BHA, 80% |  |  |  | | PT YYY – BHI, 10% | XX Corp. – BHA, 60% | Sdri. W – WNI, 60% |  | | VW Corp. – BHA, 40% |  | | Sdr. X – WNI, 40% |  |  | | PT YXY – BHI, 10% | PT ZYZ – BHI, 70% | XYZ Corp. – BHA, 55% |  | | PT ZZW – BHI, 45% | dst | | VV Corp. – BHA, 30% | PT YYX – BHI, 70% | Sdr. Y – WNI, 60% | | Sdr. Z – WNI, 40% | | Sdri. V – WNA, 30% |  |  1. Kepemilikan asing:   = XYX Inc. + (PT YYY \* XX Corp.\*VW Corp) + (PT YXY \* PT ZYZ \* XYZ Corp) + (PT YXY \* VV Corp \* Sdri. V)  = 80% + (10% \* 60% \* 40%) + (10% \* 70% \* 55%) + (10% \* 30% \* 30%)  = **87.15%**   1. Kepemilikan lokal:   = (PT YYY \* XX Corp \* Sdri. W) + (PT YYY \* Sdr. X) + (PT YXY \* PT ZYZ \* PT ZZW) + (PT YXY \* VV Corp. \* PT YYX \* Sdr. Y) + (PT YXY \* VV Corp \* PT YYX \* Sdr. Z)  = (10% \* 60% \* 60%) + (10% \* 40% ) + (10% \* 70% \* 45%) + (10% \* 30% \* 70% \* 60%) + (10% \* 30% \* 70% \* 40%)  = 12.85% |  |
|  | 1. perhitungan Kepemilikan Asing dari pemegang saham Perusahaan berbentuk badan hukum Indonesia yang merupakan perseroan terbuka dihitung berdasarkan kumulatif persentase kepemilikan saham oleh seluruh Badan Hukum Asing sebagaimana tercantum dalam struktur kepemilikan yang terdapat pada bursa efek. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | Hasil identifikasi Kepemilikan Asing dan pemenuhan kriteria Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib dilaporkan Perusahaan secara periodik dengan mengikuti bentuk dan susunan laporan berkala Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan berkala perusahaan perasuransian. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 1. Bagi pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum Indonesia, jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan ditetapkan paling tinggi sebesar Ekuitas pemegang saham. | Yang dimaksud jumlah penyertaan langsung pada ketentuan ini adalah jumlah yang tercatat sebagai penyertaan yang diakui. |  |
|  | 1. Ketentuan jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemegang saham Perusahaan yang merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Bagi lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi dan/atau penyertaan. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan: | Cukup jelas. |  |
|  | 1. penyetoran modal pada saat pendirian Perusahaan; |  |  |
|  | 1. penyertaan langsung sebagai pemegang saham baru Perusahaan pada saat Perusahaan telah mendapatkan izin usaha; dan/atau |  |  |
|  | 1. penambahan penyertaan pada Perusahaan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Pemegang Saham Pengendali yang berbentuk badan hukum harus telah beroperasi paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan. |  |  |
|  | 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi: |  |  |
|  | 1. Pemegang Saham Pengendali baru hasil penggabungan, peleburan, atau pemisahan. |  |  |
|  | 1. pemerintah pusat; atau |  |  |
|  | 1. pemerintah daerah; |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 1. Sumber dana untuk penyertaan dan penambahan modal kepada Perusahaan dilarang berasal dari: |  |  |
|  | 1. kegiatan pencucian uang (*money laundering*), pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lain; dan | Pengertian pencucian uang (*money laundering*) mengacu pada ketentuan yang berkaitan dengan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Larangan kegiatan pencucian uang (*money laundering*), pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lain berlaku hingga *ultimate shareholder*. |  |
|  | 1. pinjaman. | Yang termasuk pinjaman adalah seluruh bentuk pemberian fasilitas penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pemberi pinjaman dengan pihak lain, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Larangan sumber dana untuk modal disetor dalam bentuk pinjaman berlaku juga untuk pinjaman yang berasal dari pemegang saham termasuk dari pemegang saham *ultimate shareholder*, dalam rangka mendukung *going concern* dan kesehatan keuangan Perusahaan. |  |
|  | 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, tidak berlaku dalam hal pemegang saham Perusahaan adalah badan hukum Indonesia yang dimiliki oleh: |  |  |
|  | 1. pemerintah pusat; atau | Yang dimaksud dengan pemerintah pusat dalam ketentuan ini adalah termasuk badan usaha milik negara yang kepemilikan negara atas badan usaha milik negara dimaksud paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh nominal saham. |  |
|  | 1. pemerintah daerah. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |  |
|  | Bagian Ketiga |  |  |
|  | Nama Perusahaan |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 1. Perusahaan harus menggunakan nama Perusahaan yang dimulai dengan bentuk badan hukum, nama, dan memuat kata: | Ketentuan ini dimaksudkan agar Perusahaan tidak menggunakan nama yang menimbulkan penafsiran bahwa nama Perusahaan tersebut bukan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, atau Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi. |  |
|  | 1. Pialang Asuransi, *insurance broker,* atau kata yang mencirikan kegiatan Pialang Asuransi bagi Perusahaan Pialang Asuransi; |  |  |
|  | 1. Pialang Reasuransi, *reinsurance broker*, atau kata yang mencirikan kegiatan Pialang Reasuransi bagi Perusahaan Pialang Reasuransi; atau |  |  |
|  | 1. penilai kerugian asuransi, *adjuster*, atau kata yang mencirikan kegiatan penilai kerugian asuransi bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi. |  |  |
|  | 1. Penggunaan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Nama Perusahaan wajib dicantumkan secara jelas pada gedung kantor, iklan, dan kop surat Perusahaan. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Perusahaan untuk mengubah nama Perusahaan apabila nama Perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |  |
|  | Bagian Keempat |  |  |
|  | Modal Disetor Pada Saat Pendirian |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan Pialang Asuransi harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). |  |  |
|  | 1. Perusahaan Pialang Reasuransi harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). |  |  |
|  | 1. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). |  |  |
|  | 1. Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) wajib disetor secara tunai dan penuh dalam bentuk deposito berjangka dan/atau rekening giro atas nama Perusahaan pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Bagian Kelima |  |  |
|  | Persyaratan Modal Disetor Bagi Perusahaan Yang telah Mendapatkan Izin Usaha |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan Pialang Asuransi yang telah mendapatkan izin usaha wajib menyesuaikan Modal Disetor paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). |  |  |
|  | 1. Perusahaan Pialang Reasuransi yang telah mendapatkan izin usaha wajib menyesuaikan Modal Disetor paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). |  |  |
|  | 1. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang telah mendapatkan izin usaha wajib menyesuaikan Modal Disetor paling sedikit sebesar Rp2.000.000,00 (dua miliar rupiah). |  |  |
|  | 1. Kewajiban penyesuaian Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hanya dapat dilakukan dalam bentuk: |  |  |
|  | 1. setoran tunai; |  |  |
|  | 1. konversi/pengalihan saldo laba; |  |  |
|  | 1. konversi/pengalihan pinjaman; dan/atau |  |  |
|  | 1. saham bonus. |  |  |
|  | 1. Penyesuaian Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan OJK ini diundangkan. |  |  |
|  | 1. Penyesuaian Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan OJK ini diundangkan. |  |  |
|  | 1. Perusahaan wajib menyusun dan mencantumkan rencana tahapan penyesuaian Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) secara rinci per tahun (*action plan*) dalam rencana bisnis tahun berjalan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Bagian Keenam |  |  |
|  | Ekuitas Minimum |  |  |
|  |  | Cukup Jelas |  |
|  | 1. Perusahaan Pialang Asuransi setiap saat wajib memiliki ekuitas paling sedikit sebesar: |  |  |
|  | 1. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi Perusahaan Pialang Asuransi yang tidak menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital; atau |  |  |
|  | 1. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi Perusahaan Pialang Asuransi yang menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital. |  |  |
|  | 1. Bagi Perusahaan Pialang Asuransi yang tidak menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang telah mendapatkan izin usaha sebelum Peraturan OJK ini diundangkan, dan memiliki ekuitas di bawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memiliki ekuitas sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan OJK ini diundangkan. |  |  |
|  | 1. Bagi Perusahaan Pialang Asuransi yang telah menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum Peraturan OJK ini diundangkan, dan memiliki ekuitas di bawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memiliki ekuitas dengan tahapan sebagai berikut: |  |  |
|  | 1. paling sedikit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berlaku pada saat Peraturan OJK ini diundangkan; |  |  |
|  | 1. paling sedikit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2023; |  |  |
|  | 1. paling sedikit sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2024; dan |  |  |
|  | 1. paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2025 |  |  |
|  | 1. Perusahaan Pialang Reasuransi setiap saat wajib memiliki ekuitas paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). |  |  |
|  | 1. Perusahaan Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang telah mendapatkan izin usaha sebelum Peraturan OJK ini diundangkan, dan memiliki ekuitas di bawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib memiliki ekuitas sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan OJK ini diundangkan. |  |  |
|  | 1. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi setiap saat wajib memiliki ekuitas paling sedikit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). |  |  |
|  | 1. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang telah mendapatkan izin usaha sebelum Peraturan OJK ini diundangkan, dan memiliki ekuitas di bawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib memiliki ekuitas sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan OJK ini diundangkan. |  |  |
|  | Sanksi Administratif |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (4), Pasal 13 ayat (5), dan Pasal 14 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. |  |  |
|  | 1. Dalam hal Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Perusahaan dikenai sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. |  |  |
|  | 1. Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Bagian Kedelapan |  |  |
|  | Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Perusahaan tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan. |  |  |
|  | BAB III |  |  |
|  | PERIZINAN USAHA |  |  |
|  | Bagian Kesatu |  |  |
|  | Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Izin Usaha |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Setiap Pihak yang menyelenggarakan Usaha Pialang Asuransi, Usaha Pialang Reasuransi, atau Usaha Penilai Kerugian Asuransi wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  | 1. Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  | 1. Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan bersama dengan daftar persyaratan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
|  | 1. Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pihak Utama. |  |  |
|  | 1. Ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Perusahaan dan format permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Bagian Kedua |  |  |
|  | Persetujuan atau Penolakan Permohonan Izin Usaha |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan izin usaha diterima lengkap dan benar. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: |  |  |
|  | 1. penelitian atas kelengkapan dokumen; | Yang dimaksud dengan penelitian atas kelengkapan dokumen meliputi kesesuaian dokumen dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. |  |
|  | 1. verifikasi sumber dana dan setoran modal; | Verifikasi setoran modal dapat dilakukan antara lain dengan melakukan verifikasi penerimaan setoran modal oleh Perusahaan dan verifikasi transaksi keuangan terkait setoran modal yang bersumber dari transaksi dalam kelompok usaha (*intra-group transaction*). |  |
|  | 1. analisis kelayakan atas rencana bisnis Perusahaan dalam rangka persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3); | Cukup jelas. |  |
|  | 1. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pihak utama; dan | Cukup jelas. |  |
|  | 1. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Perusahaan untuk memastikan kesiapan operasional Perusahaan. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menemukan kekurangan dokumen berdasarkan analisis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau hasil peninjauan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima atau dokumen terakhir yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen Otoritas Jasa Keuangan. | Pemohon yang dimaksud dapat diwakili oleh Pemegang Saham atau Direksi perusahaan yang mengajukan permohonan izin usaha Perusahaan. |  |
|  | 1. Dalam hal pemohon telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, pemohon dianggap membatalkan permohonan izin usaha. | Yang dimaksud dengan membatalkan permohonan izin usaha antara lain permohonan izin usaha yang dibatalkan oleh pemohon atau permohon dianggap membatalkan izin usaha karena lewatnya batas waktu penyampaian tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen. |  |
|  | 1. Dalam hal permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian izin usaha kepada Perusahaan. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 1. Perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Yang dimaksud dengan tanggal dilakukannya kegiatan usaha adalah tanggal penandatanganan bukti penempatan asuransi. |  |
|  | 1. Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |  |
|  | Bagian Ketiga |  |  |
|  | Sanksi Administratif |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. |  |  |
|  | 1. Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). |  |  |
|  | 1. Dalam hal Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Perusahaan dikenai sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. |  |  |
|  | 1. Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Bagian Keempat |  |  |
|  | Penurunan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan dan Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Perusahaan tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | BAB IV |  |  |
|  | PENGENDALI |  |  |
|  | Bagian Pertama |  |  |
|  | Pengendali |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 1. Pihak yang dikategorikan sebagai Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: | Cukup jelas. |  |
|  | * 1. pemegang saham; atau |  |  |
|  | * 1. bukan pemegang saham. |  |  |
|  | 1. Pihak yang dikategorikan sebagai Pengendali yang merupakan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pemegang Saham Pengendali. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Pengendali yang merupakan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria persyaratan integritas dan kelayakan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Pengendali yang bukan merupakan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria persyaratan integritas dan reputasi keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. | Yang dimaksud dengan bukan pemegang saham adalah Pihak yang secara tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan dan/atau memengaruhi tindakan Direksi dan/atau Dewan Komisaris. |  |
|  |  |  |  |
|  | BAB VI |  |  |
|  | SUSUNAN ORGANISASI |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 1. Perusahaan Pialang Asuransi wajib memiliki susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas pemisahan fungsi utama paling sedikit: |  |  |
|  | 1. pelayanan; | Fungsi pelayanan antara lain terdiri dari:  1. fungsi konsultasi;  2. fungsi edukasi perlindungan konsumen;  3. fungsi pemasaran; dan  4. fungsi penyelesaian klaim atau pengaduan. |  |
|  | 1. teknis kepialangan; | Fungsi teknis kepialangan antara lain terdiri dari analisis dan mitigasi risiko, penempatan asuransi dan reasuransi. |  |
|  | 1. administrasi dan keuangan; | Cukup jelas. |  |
|  | 1. audit internal; dan | Cukup jelas. |  |
|  | 1. penerapan program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan Pialang Reasuransi wajib memiliki susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas pemisahan fungsi utama paling sedikit: |  |  |
|  | 1. pelayanan; | Fungsi pelayanan antara lain terdiri dari:  1. fungsi konsultasi;  2. fungsi edukasi perlindungan konsumen;  3. fungsi pemasaran; dan  4. fungsi penyelesaian klaim atau pengaduan. |  |
|  | 1. teknis kepialangan; | Fungsi teknis penilaian kerugian asuransi antara lain terdiri dari, fungsi pelaksanaan survey, fungsi penilaian kerugian, fungsi penyusunan laporan perhitungan/penilaian atas kerugian. |  |
|  | 1. administrasi dan keuangan; dan | Cukup jelas. |  |
|  | 1. audit internal. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib memiliki susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi: | Cukup jelas. |  |
|  | 1. pelayanan; |  |  |
|  | 1. teknis penilai kerugian asuransi; |  |  |
|  | 1. administrasi dan keuangan; dan |  |  |
|  | 1. audit internal. |  |  |
|  | 1. Pemisahan secara jelas fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk fungsi penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Tugas dan wewenang fungsi penerapan program APU PPT sebagaimana Pasal 23 ayat (1) huruf e mengacu pada tugas dan wewenang penanggung jawab penerapan program APU dan PPT pada ketentuan yang mengatur tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis, yang ditetapkan oleh Direksi. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus mencerminkan adanya pengendalian internal yang baik. | Pengendalian internal yang baik antara lain ditunjukkan dengan adanya pembagian tugas yang memungkinkan antar fungsi saling mengawasi (cross check) dan review pekerjaan secara berjenjang. |  |
|  | 1. Pengelolaan Perusahaan wajib didukung paling sedikit dengan sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), dan ayat (8) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. |  |  |
|  | 1. Dalam hal Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Perusahaan dikenai sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. |  |  |
|  | 1. Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Perusahaan tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | BAB VI |  |  |
|  | SUMBER DAYA MANUSIA |  |  |
|  | Bagian Kesatu |  |  |
|  | Ketentuan Rangkap Jabatan Bagi Direksi dan Komisaris |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 1. Anggota Direksi Perusahaan dilarang merangkap jabatan pada perusahaan perasuransian dan perusahaan lain. | Yang dimaksud perusahaan perasuransian dalam ketentuan ini adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.  Yang dimaksud perusahaan lain dalam ketentuan ini adalah perusahaan selain perusahaan perasuransian. |  |
|  | 1. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila anggota Direksi selain direktur utama yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi Perusahaan. | Yang dimaksud dengan anak perusahaan dalam ketentian ini adalah perusahaan yang Sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Perusahaan (atau Perusahaan melakukan penyertaan pada suatu badan usaha lain) pada level pertama. |  |
|  | 1. Direktur utama Perusahaan dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan perasuransian yang bersangkutan. | Tujuan pengaturan larangan rangkap jabatan bagi Direktur utama Perusahaan dalam ketentuan ini, yaitu Direktur utama Perusahan diharapkan mendedikasikan tenaga, pikiran dan waktu secara penuh kepada Perusahaan sehingga tidak dimungkinkan untuk merangkap pekerjaan atau jabatan di perusahaan lain termasuk anak perusahaan. |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 1. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau anggota DPS pada perusahaan perasuransian yang memiliki bidang usaha yang sama. | Yang dimaksud dengan perusahaan perasuransian yang memiliki bidang usaha yang sama dalam ketentuan ini, yaitu contoh:  Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pialang Asuransi tidak dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris, anggota Direksi, atau anggota DPS pada Perusahaan Pialang Asuransi lainnya. |  |
|  | 1. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan hanya dapat merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris atau anggota DPS pada paling banyak 3 (tiga) perusahaan lain yang bukan merupakan perusahaan perasuransian yang memiliki bidang usaha yang sama. | Yang dimaksud dengan rangkap jabatan yang diperkenankan dalam ketentuan ini, yaitu Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pialang Asuransi XYZ hanya dapat merangkap jabatan paling banyak 3 (tiga) jabatan, contoh:   1. sebagai Direksi pada perusahaan lain (bukan perusahaan perasuransian); 2. sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi Pialang Reasuransi; dan 3. sebagai anggota DPS pada Perusahaan Asuransi. |  |
|  |  |  |  |
|  | Bagian Kedua |  |  |
|  | Sertifikasi |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Anggota Direksi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi yang membawahi fungsi teknis kepialangan asuransi dan reasuransi wajib memiliki sertifikat kepialangan dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian. |  |  |
|  | 1. Anggota Direksi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang membawahi fungsi teknis penilai kerugian asuransi wajib memiliki sertifikat ahli penilai kerugian asuransi dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian. |  |  |
|  | 1. Anggota Direksi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi selain yang membawahi fungsi teknis kepialangan asuransi dan reasuransi wajib memiliki: |  |  |
|  | 1. sertifikat kepialangan dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian; atau |  |  |
|  | 1. sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang manajemen risiko. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Bagian Ketiga |  |  |
|  | Penggunaan Tenaga Kerja Asing |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 1. Perusahaan dapat menggunakan tenaga kerja asing. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dipekerjakan sebagai: | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Tenaga Ahli dengan level jabatan satu tingkat di bawah Direksi; dan/atau |  |  |
|  | 1. konsultan. |  |  |
|  | 1. Perusahaan hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja asing yang menangani fungsi: | Cukup jelas. |  |
|  | 1. teknis kepialangan, bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi; |  |  |
|  | 1. teknis penilaian kerugian asuransi, bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; |  |  |
|  | 1. pemasaran; dan/atau |  |  |
|  | 1. sistem informasi. |  |  |
|  | 1. Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan: | Cukup jelas. |  |
|  | 1. memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya; |  |  |
|  | 1. tenaga kerja asing tersebut menduduki jabatan yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia; dan |  |  |
|  | 1. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. |  |  |
|  | 1. Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  |  |
|  | 1. tenaga kerja asing dipekerjakan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun; dan | Cukup jelas. |  |
|  | 1. tenaga kerja asing didampingi oleh tenaga kerja Indonesia dalam rangka alih pengetahuan, keahlian, dan teknologi. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  |  |
|  | 1. tenaga kerja asing hanya dipekerjakan untuk melaksanakan proyek atau program tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasional di bidang perasuransian; | Cukup jelas. |  |
|  | 1. jangka waktu untuk proyek atau program sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 5 (lima) tahun; dan | Jangka waktu lima tahun sebagaimana dimaksud pada huruf ini merupakan jangka waktu keseluruhan tenaga kerja asing dipekerjakan sebagai Tenaga Ahli oleh Perusahaan dan tidak dapat diangkat kembali. |  |
|  | 1. tenaga kerja asing didampingi oleh tenaga kerja Indonesia dalam rangka alih pengetahuan, keahlian, dan teknologi. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk meminta Perusahaan memberhentikan tenaga kerja asing yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), wajib terlebih dahulu menyampaikan permohonan persetujuan atas rencana mempekerjakan tenaga kerja asing. |  |  |
|  | 1. Permohonan persetujuan atas rencana mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  | 1. Dalam rangka melakukan permohonan persetujuan atas rencana mempekerjakan tenaga kerja asing, Perusahaan harus terlebih dahulu mencantumkan rencana penggunaan tenaga kerja asing dalam rencana bisnis tahun berjalan. |  |  |
|  | 1. Permohonan persetujuan atas rencana mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersama dengan daftar persyaratan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan harus mengangkat tenaga kerja asing paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat persetujuan atas rencana mempekerjakan tenaga kerja asing dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  | 1. Perusahaan wajib melaporkan pengangkatan atau pemberhentian tenaga kerja asing kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat pengangkatan atau pemberhentian. |  |  |
|  | 1. Pelaporan pengangkatan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
|  | 1. Pelaporan pemberhentian tenaga kerja asing sebagaiman dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai alasan pemberhentian. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 1. Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), wajib menyelenggarakan kegiatan alih pengetahuan dari tenaga kerja asing kepada pegawai Perusahaan. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Penyelenggaran program alih pengetahuan dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan tahunan kepada pegawai Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan dalam laporan realisasi rencana bisnis. | Yang dimaksud dengan “laporan realisasi rencana bisnis” adalah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. |  |
|  |  |  |  |
|  | Bagian Keempat |  |  |
|  | Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan wajib menyampaikan rencana program pengembangan kemampuan dan pengetahuan setiap tahun bagi pegawainya dalam Laporan rencana bisnis. |  |  |
|  | 1. Perusahaan wajib menyelenggarakan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan sesuai dengan rencana program pengembangan kemampuan dan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |
|  | 1. Pengembangan kemampuan dan pengetahuan bagi pegawai Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan tahunan. |  |  |
|  | 1. Perusahaan wajib menganggarkan dan merealisasikan paling sedikit 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya sumber daya manusia Perusahaan untuk program pendidikan dan pelatihan. |  |  |
|  | 1. Penyelenggaran pengembangan kemampuan dan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan dalam laporan realisasi rencana bisnis. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Bagian Kelima |  |  |
|  | Sanksi Administratif |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), ayat (3), Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. |  |  |
|  | 1. Dalam hal Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Perusahaan dikenai sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. |  |  |
|  | 1. Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Bagian Keenam |  |  |
|  | Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan Perusahaan tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | BAB VII |  |  |
|  | PIALANG ASURANSI DAN PIALANG REASURANSI |  |  |
|  | Bagian Kesatu |  |  |
|  | Pialang Asuransi |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Perusahaan Pialang Asuransi wajib mempekerjakan Pialang Asuransi secara penuh waktu. | Yang dimaksud dengan penuh waktu adalah Pialang Asuransi yang mengikatkan diri pada satu Perusahaan Pialang Asuransi dan tidak bekerja pada perusahaan lain. |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 1. Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: | Cukup jelas. |  |
|  | 1. memiliki sertifikat kepialangan dengan level paling rendah 2 (dua) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian; |  |  |
|  | 1. memiliki pengalaman kerja di bidang teknis kepialangan dan/atau teknis asuransi paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan |  |  |
|  | 1. menjadi anggota Asosiasi pialang asuransi di Indonesia. |  |  |
|  | 1. Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada unit yang bertanggung jawab terhadap fungsi teknis pelayanan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 1. Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Untuk terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perusahaan Pialang Asuransi harus mendaftarkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran diterima. |  |  |
|  | 1. Pemohon harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  | 1. Dalam hal pemohon telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |
|  | 1. Dalam rangka memproses permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan. |  |  |
|  | 1. Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, pemohon dianggap membatalkan permohonan pendaftaran. |  |  |
|  | 1. Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat tanda terdaftar kepada pemohon. |  |  |
|  | 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Surat tanda terdaftar Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) dapat dibatalkan dalam hal Pialang Asuransi: |  |  |
|  | 1. tidak lagi menjadi anggota asosiasi profesi Pialang Asuransi; | Tidak lagi menjadi anggota asosiasi pialang asuransi antara lain karena meninggal dunia. |  |
|  | 1. dinyatakan melanggar kode etik dan standar praktik oleh asosiasi profesi Pialang Asuransi yang bersangkutan; | Cukup jelas. |  |
|  | 1. dicabut gelar profesinya oleh asosiasi profesi yang mengeluarkan gelar tersebut; atau | Cukup jelas. |  |
|  | 1. melakukan perbuatan tercela di bidang usaha jasa keuangan. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan Pialang Asuransi wajib melaporkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Pialang Asuransi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengangkatan dan/atau pemberhentian. |  |  |
|  | 1. Pelaporan pengangkatan Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen berupa surat tanda terdaftar pialang asuransi yang dipekerjakan. |  |  |
|  | 1. Pelaporan pemberhentian Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian Pialang Asuransi yang ditandatangi oleh Direksi. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Bagian Kedua |  |  |
|  | Pialang Reasuransi |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Perusahaan Pialang Reasuransi wajib mempekerjakan Pialang Reasuransi secara penuh waktu. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: |  |  |
|  | 1. memiliki sertifikat kepialangan dengan level paling rendah 2 (dua) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi atau sertifikat dari luar negeri setelah terlebih dahulu memperoleh pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Profesi; |  |  |
|  | 1. memiliki pengalaman kerja di bidang teknik kepialangan dan pengelolaan risiko paling singkat 3 (tiga) tahun; dan |  |  |
|  | 1. menjadi anggota Asosiasi profesi di Indonesia. |  |  |
|  | 1. Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada unit yang bertanggung jawab terhadap fungsi pelayanan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Pialang Resuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  | 1. Untuk terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perusahaan Pialang Reasuransi harus mendaftarkan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran diterima. |  |  |
|  | 1. Pemohon harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  | 1. Dalam hal pemohon telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |
|  | 1. Dalam rangka memproses permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen permohonan. |  |  |
|  | 1. Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, pemohon dianggap membatalkan permohonan pendaftaran. |  |  |
|  | 1. Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat tanda terdaftar kepada pemohon. |  |  |
|  | 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Surat tanda terdaftar Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6) dapat dibatalkan dalam hal Pialang Reasuransi: |  |  |
|  | 1. tidak lagi menjadi anggota Asosiasi Pialang Reasuransi; | Tidak lagi menjadi anggota asosiasi pialang asuransi antara lain karena meninggal dunia. |  |
|  | 1. dinyatakan melanggar kode etik dan standar praktik oleh Asosiasi Pialang Reasuransi yang bersangkutan; | Cukup jelas. |  |
|  | 1. dicabut gelar profesinya oleh Asosiasi yang mengeluarkan gelar tersebut; atau | Cukup jelas. |  |
|  | 1. melakukan perbuatan tercela di bidang usaha perasuransian. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan Pialang Reasuransi wajib melaporkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Pialang Reasuransi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengangkatan atau pemberhentian. |  |  |
|  | 1. Pelaporan pengangkatan Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen berupa surat tanda terdaftar Pialang Reasuransi yang dipekerjakan. |  |  |
|  | 1. Pelaporan pemberhentian Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian Pialang Reasuransi yang ditandatangi oleh Direksi. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Bagian Ketiga |  |  |
|  | Sanksi Administratif |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 44 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. |  |  |
|  | 1. Dalam hal Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Perusahaan dikenai sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. |  |  |
|  | 1. Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Bagian Keempat |  |  |
|  | Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan Perusahaan tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | BAB VIII |  |  |
|  | TENAGA AHLI DAN AUDITOR INTERNAL |  |  |
|  | Bagian Kesatu |  |  |
|  | Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Asuransi |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan Pialang Asuransi wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Asuransi secara penuh waktu. |  |  |
|  | 1. Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: |  |  |
|  | 1. memiliki sertifikat ahli pialang asuransi dengan level tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian; |  |  |
|  | 1. memiliki pengalaman kerja di bidang teknis kepialangan dan/atau teknis asuransi paling singkat 3 (tiga) tahun; dan |  |  |
|  | 1. menjadi anggota asosiasi profesi di Indonesia. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 1. Perusahaan Pialang Asuransi wajib menyesuaikan Tenaga Ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan volume dan kompleksitas usaha Perusahaan. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: | Cukup jelas. |  |
|  | 1. memiliki sertifikat ahli pialang asuransi dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian; |  |  |
|  | 1. memiliki pengalaman kerja di bidang teknis kepialangan dan/atau teknis asuransi paling singkat 3 (tiga) tahun; dan |  |  |
|  | 1. menjadi anggota asosiasi profesi di Indonesia. |  |  |
|  | 1. Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada unit yang bertanggung jawab terhadap fungsi teknis kepialangan. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan Pialang Asuransi dilarang mengangkat Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pegawai pada perusahaan lainnya. | Maksud dari ketentuan ini ditujukan agar Tenaga Ahli dapat memberikan hasil penilaian dan *professional judgement* yang sesuai dengan keahliannya tanpa terpengaruh oleh tanggung jawab sebagai Direksi. |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 1. Perusahaan Pialang Asuransi wajib melaporkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Asuransi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengangkatan dan/atau pemberhentian Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Asuransi. | Yang dimaksud dengan pelaporan pengangkatan dan/atau pemberhentian Tenaga Ahli pada ketentuan ini termasuk pengangkatan dan/atau pemberhentian Tenaga Ahli dalam internal Perusahaan.  Contohnya: Dalam hal Perusahaan Perasuransian A mengangkat Tenaga Ahli XYZ pada Kantor di Luar Kantor Pusat (misal: di Bandung) sekaligus memberhentikan Tenaga Ahli FGH dari Kantor di Luar Kantor Pusat (di Bandung) dan mengangkat Tenaga Ahli FGH di kantor pusat, maka Perusahaan Perasuransian A wajib melaporkan pengangkatan Tenaga Ahli XYZ dan Tenaga Ahli FGH, serta melaporkan pemberhentian Tenaga Ahli FGH dari Kantor di Luar Kantor Pusat (Bandung). |  |
|  | 1. Pelaporan pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan dilampiri surat tanda terdaftar Tenaga Ahli yang dipekerjakan. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Pelaporan pemberhentian Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |  |
|  | Bagian Kedua |  |  |
|  | Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan Pialang Reasuransi wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi secara penuh waktu. |  |  |
|  | 1. Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: |  |  |
|  | 1. memiliki sertifikat ahli Pialang Reasuransi dengan kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian; |  |  |
|  | 1. memiliki pengalaman kerja di bidang teknis kepialangan dan pengelolaan risiko paling singkat 3 (tiga) tahun; dan |  |  |
|  | 1. menjadi anggota Asosiasi profesi di Indonesia |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menyesuaikan Tenaga Ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan volume dan kompleksitas usaha Perusahaan. |  |  |
|  | 1. Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: |  |  |
|  | 1. memiliki sertifikat ahli Pialang Reasuransi dengan kualifikasi paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian; |  |  |
|  | 1. memiliki pengalaman kerja di bidang teknis kepialangan dan/atau teknis asuransi paling singkat 3 (tiga) tahun; dan; |  |  |
|  | 1. menjadi anggota Asosiasi profesi di Indonesia. |  |  |
|  | 1. Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada unit yang bertanggung jawab terhadap fungsi teknis kepialangan. |  |  |
|  | 1. Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi dilarang mengangkat Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pegawai pada perusahaan lainnya. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan Pialang Reasuransi wajib melaporkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengangkatan dan/atau pemberhentian Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi. |  |  |
|  | 1. Pelaporan pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
|  | 1. Pelaporan pemberhentian Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Bagian Ketiga |  |  |
|  | Tenaga Ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi secara penuh waktu. |  |  |
|  | 1. Tenaga Ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: |  |  |
|  | 1. memiliki sertifikat ahli penilai kerugian asuransi dengan kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian; |  |  |
|  | 1. memiliki pengalaman kerja di bidang penilaian kerugian paling singkat 3 (tiga) tahun; dan |  |  |
|  | 1. menjadi anggota Asosiasi profesi di Indonesia. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib menyesuaikan Tenaga Ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan volume dan kompleksitas usaha Perusahaan. |  |  |
|  | 1. Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: |  |  |
|  | 1. memiliki sertifikat ahli penilai kerugian asuransi dengan kualifikasi paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian; |  |  |
|  | 1. memiliki pengalaman kerja di bidang penilaian kerugian paling singkat 3 (tiga) tahun; dan |  |  |
|  | 1. menjadi anggota Asosiasi profesi di Indonesia. |  |  |
|  | 1. Tenaga Ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada unit yang bertanggung jawab terhadap fungsi teknis penilai kerugian |  |  |
|  | 1. Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah dilarang mengangkat Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pegawai pada perusahaan lainnya. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib melaporkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Tenaga Ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengangkatan dan/atau pemberhentian Tenaga Ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi. |  |  |
|  | 1. Pelaporan pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
|  | 1. Pelaporan pemberhentian Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Bagian Keempat |  |  |
|  | Sanksi Administratif |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), dan ayat (4), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), ayat (4), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), dan ayat (4), dan Pasal 58 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis |  |  |
|  | 1. Dalam hal Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Perusahaan dikenai sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. |  |  |
|  | 1. Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Bagian Kelima |  |  |
|  | Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan Perusahaan tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | BAB IX |  |  |
|  | KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 1. Perusahaan dapat membuka kantor di luar kantor pusat di dalam atau di luar negeri. | Jenis kantor di luar kantor pusat yaitu kantor cabang, perwakilan, pemasaran, atau operasional. |  |
|  | 1. Perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap kantor yang dimiliki/dikelola Perusahaan atau yang pemilik atau pengelolanya diberi izin menggunakan nama Perusahaan yang bersangkutan. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Pembukaan kantor di luar kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu tercantum dalam rencana bisnis Perusahaan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan wajib melaporkan setiap pembukaan dan/atau penutupan kantor di luar kantor pusat kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  | 1. Pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah kantor tersebut beroperasi, bersama dengan daftar persyaratan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 1. Perusahaan yang akan menutup kantor di luar kantor pusat wajib terlebih dahulu: | Cukup jelas. |  |
|  | 1. memberitahukan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai rencana penutupan kantor di luar kantor pusat; |  |  |
|  | 1. memberitahukan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai prosedur penyelesaian hak dan kewajiban; dan |  |  |
|  | 1. melaksanakan pengalihan pelayanan kepada pemegang polis, tertanggung, dan peserta serta hak dan kewajiban dari kantor di luar kantor pusat yang di tutup ke kantor pusat atau kantor di luar kantor pusat terdekat. |  |  |
|  | 1. Dalam hal penutupan kantor di luar kantor pusat yang dikelola atau dimiliki oleh pihak ketiga selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib menyelesaikan hak dan kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kerja sama dalam hal pembukaan kantor di luar kantor pusat di dalam atau luar negeri dikelola atau dimiliki oleh pihak ketiga. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Prosedur penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta. | Yang dimaksud dengan memperhatikan kepentingan pemegang polis, tertanggung dan/atau peserta adalah penyelesaian hak dan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian polis. |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan wajib melaporkan penutupan kantor di luar kantor pusat secara tertulis oleh Direksi Perusahaan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penutupan kantor di luar kantor pusat. |  |  |
|  | 1. Pelaporan penutupan kantor di luar kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK, bersama dengan daftar persyaratan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Pasal 63 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 64 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. |  |  |
|  | 1. Dalam hal Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Perusahaan dikenai sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. |  |  |
|  | 1. Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan Perusahaan tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | BAB X |  |  |
|  | KEANGGOTAAN PADA ASOSIASI |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |  |
|  | 1. Setiap Perusahaan wajib menjadi anggota salah satu Asosiasi yang sesuai dengan jenis usahanya. |  |  |
|  | 1. Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  | 1. Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asosiasi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. |  |  |
|  | 1. Dalam hal Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Perusahaan dikenai sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. |  |  |
|  | 1. Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan Perusahaan tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | BAB XI |  |  |
|  | PERUBAHAN KEPEMILIKAN |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 1. Setiap perubahan kepemilikan, Perusahaan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain: | Cukup jelas. |  |
|  | 1. perubahan komposisi saham; |  |  |
|  | 1. Pengambilalihan; |  |  |
|  | 1. penambahan pemegang saham baru; dan |  |  |
|  | 1. perubahan status Perusahaan tertutup menjadi terbuka (dalam rangka *Initial Public Offering*). |  |  |
|  | 1. Dalam hal Perubahan kepemilikan karena pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disebabkan harta waris, kewajiban untuk memperoleh persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku. | Yang dimaksud dengan perubahan kepemilikan melalui penambahan pemegang saham baru hasil warisan adalah adanya pemegang saham baru sebagai akibat pengalihan hak waris dari pemegang saham sebelumnya. |  |
|  | 1. Dalam hal Perusahaan terbuka memperdagangkan sahamnya di bursa efek, kewajiban untuk memperoleh persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku dalam hal terdapat perubahan Pengendali. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Rencana perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam rencana bisnis Perusahaan periode berjalan. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Pemenuhan persyaratan terkait pencantuman rencana perubahan kepemilikan dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak berlaku bagi Perusahaan yang akan melakukan perubahan kepemilikan dalam rangka pemenuhan Ekuitas minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kesehatan Keuangan Perusahaan. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Dalam hal perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh adanya penambahan Modal Disetor maka penambahan modal dimaksud hanya dapat dilakukan dalam bentuk: |  |  |
|  | 1. setoran tunai; | Cukup jelas. |  |
|  | 1. konversi/pengalihan saldo laba; | Cukup jelas. |  |
|  | 1. konversi/pengalihan pinjaman; dan/atau | Cukup jelas. |  |
|  | 1. saham bonus. | Yang dimaksud dengan saham bonus dalam huruf d adalah saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Saham bonus terdiri dari dua, yaitu:   * 1. yang merupakan dividen saham, berasal dari kapitalisasi saldo laba.   2. yang bukan merupakan dividen saham, berasal dari kapitalisasi:   3. agio saham; dan/atau   4. unsur ekuitas lainnya |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 1. Perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dan akan melakukan perubahan kepemilikan melalui Pengambilalihan wajib menyesuaikan dengan ketentuan mengenai Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan memenuhi ketentuan pengajuan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2). | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Kewajiban penyesuaian terhadap ketentuan mengenai Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Perusahaan yang akan melakukan: |  |  |
|  | 1. perubahan kepemilikan melalui Pengambilalihan yang merupakan hasil warisan; | Cukup jelas. |  |
|  | 1. perubahan kepemilikan dalam rangka pemenuhan Ekuitas minimum sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan; | Cukup jelas. |  |
|  | 1. perubahan kepemilikan dalam rangka restrukturisasi kelompok usaha Perusahaan; dan | Restruksturisasi yang dimaksud pada ayat ini yaitu perpindahan kepemilikan Perusahaan atau perubahan hubungan antar entitas dalam suatu kelompok usaha atau penguasaan yang sama, biasanya bersifat strategis bagi kelompok usaha tersebut.  Contoh : Perusahaan Perasuransian PT X dimiliki oleh PT ABC. Berdasarkan strategi bisnis yang akan diterapkan oleh pemegang saham PT ABC, PT ABC akan ditujukan sebagai induk yang menaungi anak perusahaan di bidang non-jasa keuangan. Sedangkan, anak perusahaan di bidang jasa keuangan akan dinaungi oleh PT DEF, yang merupakan *sister company* dari PT ABC. Dengan demikian, terjadi perubahan kepemilikan pada Perusahaan Perasuransian PT X yang disebabkan adanya restrukturisasi di dalam kelompok usaha Perusahaan. |  |
|  | 1. perubahan kepemilikan dalam rangka menindaklanjuti perintah OJK untuk mengganti Pemegang Saham Pengendali. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Penyesuaian terkait ketentuan mengenai Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pada saat pelaksanaan perubahan kepemilikan. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Untuk memperoleh persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), calon pemegang saham melalui Direksi Perusahaan harus mengajukan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan bersama dengan daftar persyaratan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
|  | 1. Dalam hal perubahan kepemilikan mengakibatkan adanya Pengendali baru, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon Pengendali. |  |  |
|  | 1. Permohonan persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pengendali Perusahaan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan persetujuan perubahan kepemilikan diterima secara lengkap. |  |  |
|  | 1. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: |  |  |
|  | 1. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1); |  |  |
|  | 1. analisis kelayakan rencana perubahan kepemilikan; |  |  |
|  | 1. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pengendali, dalam hal perubahan kepemilikan melalui Pengambilalihan; dan |  |  |
|  | 1. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. |  |  |
|  | 1. Dalam rangka melakukan analisis terhadap kelayakan rencana perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen pendukung selain dokumen yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1). |  |  |
|  | 1. Perusahaan harus menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  | 1. Dalam hal Perusahaan telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |
|  | 1. Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan dianggap membatalkan permohonan perubahan kepemilikan. |  |  |
|  | 1. Dalam hal permohonan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan kepada Perusahaan. |  |  |
|  | 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Dalam hal perubahan kepemilikan Perusahaan memerlukan persetujuan RUPS, Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dari Otoritas Jasa Keuangan, harus melaksanakan RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  | 1. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Perusahaan belum melaksanakan RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan persetujuan perubahan kepemilikan yang sebelumnya telah diberikan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya bukti persetujuan dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang. |  |  |
|  | 1. Pelaporan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan bersama dengan daftar persyaratan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 75 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. |  |  |
|  | 1. Dalam hal Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Perusahaan dikenai sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. |  |  |
|  | 1. Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan Perusahaan tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | BAB XII |  |  |
|  | PELAPORAN |  |  |
|  | Bagian Kesatu |  |  |
|  | Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 1. Perusahaan yang melakukan perubahan anggaran dasar tertentu wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak persetujuan atau diterimanya surat pemberitahuan dari instansi yang berwenang. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: |  |  |
|  | * 1. perubahan nama Perusahaan termasuk dalam hal ini terjadi Penggabungan atau Peleburan atas 2 Perusahaan atau lebih; | Cukup jelas. |  |
|  | * 1. perubahan nama pemegang saham Perusahaan; | Contoh perubahan nama pemegang saham Perusahaan, misalnya PT X selaku pemegang saham Perusahaan berubah nama menjadi PT XYZ. |  |
|  | * 1. perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan; | Cukup jelas. |  |
|  | * 1. penambahan Modal Disetor bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas termasuk penambahan Modal Disetor pada bursa efek yang tidak mengakibatkan perubahan Pengendali; | Cukup jelas. |  |
|  | * 1. perubahan kepemilikan karena warisan yang tidak menyebabkan Perubahan Pemegang Saham Pengendali; dan | Cukup jelas. |  |
|  | * 1. perubahan anggaran dasar lainnya berdasarkan permintaan Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Pelaporan perubahan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Dalam hal terdapat perubahan kepemilikan Perusahaan, maka proses perubahan nama dapat diproses sepanjang perubahan kepemilikan tersebut telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |
|  | 1. Pelaporan perubahan nama pemegang saham Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Pelaporan penambahan Modal Disetor Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Pelaporan perubahan Anggaran Dasar yang disebabkan adanya penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh Perusahaan dalam hal penambahan modal dimaksud tidak mengakibatkan terjadinya: | Cukup jelas. |  |
|  | 1. perubahan komposisi saham; |  |  |
|  | 1. Pengambilalihan; dan/atau |  |  |
|  | 1. penambahan pemegang saham baru |  |  |
|  | 1. Pelaporan penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya dapat dilakukan dalam bentuk: | Cukup jelas. |  |
|  | |  | | --- | | 1. setoran tunai; | |  |  |
|  | |  | | --- | | 1. pengalihan saldo laba; | |  |  |
|  | |  | | --- | | 1. pengalihan pinjaman; dan/atau | |  |  |
|  | |  | | --- | | 1. saham bonus; | |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Bagian Kedua |  |  |
|  | Pelaporan Perubahan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan yang melakukan perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung setelah perubahan dicatat oleh instansi yang berwenang. |  |  |
|  | 1. Pelaporan perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Bagian Ketiga |  |  |
|  | Pelaporan Perubahan Alamat |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan wajib melaporkan perubahan alamat kantor pusat dan kantor di luar kantor pusat, kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal perubahan. |  |  |
|  | 1. Pelaporan perubahan alamat kantor pusat dan kantor di luar kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Bagian Keempat |  |  |
|  | Sanksi Administratif |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), Pasal 79 ayat (1), dan Pasal 80 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. |  |  |
|  | 1. Dalam hal Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Perusahaan dikenai sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. |  |  |
|  | 1. Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Bagian Kelima |  |  |
|  | Penurunan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan dan Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan Perusahaan tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | BAB XIII |  |  |
|  | PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan dapat melakukan: |  |  |
|  | 1. Penggabungan; atau |  |  |
|  | 1. Peleburan. |  |  |
|  | 1. Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan berbentuk badan hukum yang sama dan memiliki bidang usaha yang sejenis. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  | 1. Dalam hal memenuhi kewajiban memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan harus memenuhi persyaratan: |  |  |
|  | 1. telah dicantumkan dalam rencana bisnis Perusahaan; |  |  |
|  | 1. Penggabungan atau Peleburan tersebut tidak mengurangi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta; dan |  |  |
|  | 1. kondisi keuangan Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan tersebut harus memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; |  |  |
|  | 1. calon pihak utama Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan |  |  |
|  | 1. dalam hal Penggabungan atau Peleburan terdapat kepemilikan asing, maka harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepemilikan asing. |  |  |
|  | 1. Untuk memperoleh persetujuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
|  | 1. Permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pihak Utama. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan diterima secara lengkap. |  |  |
|  | 1. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: |  |  |
|  | 1. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3); |  |  |
|  | 1. analisis kelayakan atas rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan; |  |  |
|  | 1. calon pihak utama Perusahaan hasil Penggabungan dan Peleburan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan |  |  |
|  | 1. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perasuransian. |  |  |
|  | 1. Direksi Perusahaan harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  | 1. Dalam hal Direksi Perusahaan telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |
|  | 1. Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Direksi Perusahaan dianggap membatalkan permohonan persetujuan rencana Penggabungan atau Peleburan. |  |  |
|  | 1. Dalam hal permohonan Penggabungan atau Peleburan disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan rencana Penggabungan atau Peleburan kepada Perusahaan yang bersangkutan. |  |  |
|  | 1. Dalam hal persetujuan Penggabungan atau Peleburan ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan rencana Penggabungan atau Peleburan dari Otoritas Jasa Keuangan harus melaksanakan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  | 1. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Perusahaan belum melaksanakan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan, Otoritas Jasa Keuangan dapat membatalkan persetujuan rencana Penggabungan atau Peleburan yang sebelumnya telah diberikan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan yang menerima Penggabungan atau Peleburan wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS. |  |  |
|  | 1. Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: |  |  |
|  | 1. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2); dan |  |  |
|  | 1. pencabutan izin usaha dari Perusahaan yang menggabungkan atau meleburkan diri dan berlaku efektif sejak tanggal perubahan anggaran dasar: |  |  |
|  | 1. disahkan oleh; |  |  |
|  | 1. disetujui oleh; atau |  |  |
|  | 1. diberitahukan kepada |  |  |
|  | instansi yang berwenang. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan wajib melaporkan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal anggaran dasar disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang. |  |  |
|  | 1. Pelaporan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai format dengan melampirkan dokumen berupa anggaran dasar yang telah disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Dalam rangka pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan dapat mengajukan permohonan izin pembukaan Kantor di Luar Kantor Pusat yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan yang menggabungkan atau meleburkan diri kepada Otoritas Jasa Keuangan atas namanya. |  |  |
|  | 1. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan izin pembukaan Kantor di Luar Kantor Pusat terdahulu yang dimiliki oleh Perusahaan yang menggabungkan atau meleburkan diri. |  |  |
|  | 1. Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan dilarang menjalankan Kantor di Luar Kantor Pusat yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan yang menggabungkan atau meleburkan diri sebelum memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan Kantor di Luar Kantor Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin pembukaan Kantor Cabang diterima secara lengkap. |  |  |
|  | 1. Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan permohonan izin pembukaan Kantor di Luar Kantor Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) (jika ada), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: |  |  |
|  | 1. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1); |  |  |
|  | 1. mencabut izin usaha Perusahaan yang menggabungkan atau meleburkan diri yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; |  |  |
|  | 1. memberikan persetujuan atau penolakan izin usaha kepada Perusahaan yang merupakan hasil Peleburan yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; dan |  |  |
|  | 1. memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan Kantor di Luar Kantor Pusat kepada Perusahaan yang merupakan hasil Penggabungan atau Peleburan (jika ada), yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang. |  |  |
|  | 1. Dalam hal permohonan izin pembukaan Kantor di Luar Kantor Pusat disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian izin pembukaan Kantor di Luar Kantor Pusat. |  |  |
|  | 1. Dalam hal permohonan izin pembukaan Kantor di Luar Kantor Pusat ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai alasan penolakan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | Perusahaan yang melakukan Penggabungan atau Peleburan dilarang menjalankan kegiatan operasional dengan nama Perusahaan baru hasil Penggabungan atau Peleburan sebelum memperoleh pencatatan atas pelaksanaan RUPS dan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan, dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | Penggabungan dan Peleburan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | OJK memberlakukan izin usaha kepada Perusahaan yang merupakan hasil Peleburan yang efektif terhitung sejak izin usaha baru diterbitkan oleh OJK. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 93, dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. |  |  |
|  | 1. Dalam hal Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Perusahaan dikenai sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. |  |  |
|  | 1. Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan Perusahaan tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | BAB XIV |  |  |
|  | PENCABUTAN IZIN USAHA |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Pencabutan izin usaha Perusahaan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  | 1. Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Perusahaan: |  |  |
|  | 1. bubar karena: |  |  |
|  | 1. keputusan RUPS; |  |  |
|  | 1. berdasarkan penetapan pengadilan; |  |  |
|  | 1. tindak lanjut proses kepailitan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan; atau |  |  |
|  | 1. melakukan Penggabungan atau Peleburan. |  |  |
|  | 1. dikenai sanksi administratif pencabutan izin usaha; atau |  |  |
|  | 1. menghentikan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan berdasarkan permintaan Perusahaan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan yang dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a angka 3 wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak putusan pernyataan pailit oleh pengadilan. |  |  |
|  | 1. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan salinan dokumen yang menjadi dasar ditetapkannya putusan pailit. |  |  |
|  | 1. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencabutan izin usaha. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 1. Perusahaan yang akan menghentikan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf c wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perusahaan harus menyampaikan permohonan persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan yang memuat paling sedikit hal-hal sebagai berikut: |  |  |
|  | 1. alasan penghentian kegiatan usaha; | Cukup jelas. |  |
|  | 1. uraian mengenai kondisi Perusahaan, | Yang dimaksud dengan uraian mengenai kondisi Perusahaan, antara lain:   1. data mengenai polis yang masih berlaku (*in-force*) yang diperantarai oleh Perusahaan Pialang Asuransi, yang paling kurang mencakup nama pemegang polis, nama asuransi, objek yang diasuransikan, dan lain lain; 2. data mengenai perjanjian reasuransi yang masih berlaku (*in-force*) yang diperantarai oleh Perusahaan Pialang Reasuransi, yang paling kurang mencakup nama perusahaan ceding, nama reasuransi, objek yang direasuransikan, dan lain lain; dan 3. Rencana pengalihan layanan keperantaraan atas polis atau perjanjian reasuransi kepada Perusahaan lain. |  |
|  | 1. rencana penyelesaian kewajiban Perusahaan kepada seluruh kreditor; dan | Cukup jelas. |  |
|  | 1. rencana pembubaran atau rencana lainnya setelah Perusahaan menyelesaikan kewajiban kepada seluruh kreditor dan izin usaha Perusahaan telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Permohonan persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan bersama dengan daftar persyaratan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap permohonan persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha yang disampaikan oleh Direksi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2). |  |  |
|  | 1. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha secara lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan rencana penghentian kegiatan usaha. |  |  |
|  | 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan wajib untuk: |  |  |
|  | 1. menghentikan seluruh kegiatan usaha Perusahaan; |  |  |
|  | 1. mengumumkan rencana penghentian kegiatan usaha dan rencana penyelesaian kewajiban Perusahaan dalam surat kabar selama 3 (tiga) hari berturut-turut paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha; |  |  |
|  | 1. menyelesaikan seluruh kewajiban Perusahaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal surat persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha; dan |  |  |
|  | 1. Menunjuk akuntan publik untuk melakukan jasa audit atas neraca akhir termasuk melakukan verifikasi untuk memastikan penyelesaian seluruh kewajiban terkait kegiatan usaha Perusahaan. |  |  |
|  | 1. Prosedur penyelesaian seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |  |  |
|  | 1. Dalam hal permohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | Setelah seluruh kewajiban Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) diselesaikan, Direksi wajib menyampaikan laporan kepada OJK yang paling sedikit memuat: |  |  |
|  | 1. pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) huruf a; |  |  |
|  | 1. pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) huruf b; |  |  |
|  | 1. pelaksanaan penyelesaian kewajiban Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) huruf c; |  |  |
|  | 1. neraca akhir Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) huruf d; dan |  |  |
|  | 1. surat pernyataan bermaterai dari pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban Perusahaan telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis terhadap laporan yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101. |  |  |
|  | 1. Untuk melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap Perusahaan yang mengajukan permohonan penghentian kegiatan usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf c. |  |  |
|  | 1. Berdasarkan hasil analisis penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan secara lengkap, OJK menerbitkan keputusan tentang pencabutan izin usaha Perusahaan. |  |  |
|  | 1. Perusahaan yang dicabut izin usahanya wajib menghentikan kegiatan usahanya. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | Sejak tanggal pencabutan izin usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3), apabila di kemudian hari muncul kewajiban Perusahaan yang belum diselesaikan, pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi bertanggung jawab atas kewajiban dimaksud. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), Pasal 99 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 101, Pasal 102 ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. |  |  |
|  | 1. Dalam hal Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Perusahaan dikenai sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. |  |  |
|  | 1. Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan Perusahaan tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | BAB XV | Cukup jelas. |  |
|  | PENYAMPAIAN PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem pelayanan secara elektronik (*e-licensing*), permohonan perizinan, persetujuan, atau pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 30 ayat (4), Pasal 31 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 44 ayat (2), Pasal 47 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 52 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 55 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 58 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 62 ayat (2), Pasal 64 ayat (2), Pasal 67 ayat (3), Pasal 72 ayat (1), Pasal 75 ayat (2), Pasal 78 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 79 ayat (2), Pasal 80 ayat (2), Pasal 84 ayat (3), Pasal 87 ayat (2), Pasal 98 ayat (2), dan Pasal 99 ayat (3), harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  | 1. Dengan penyampaian permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan tidak perlu menyampaikan dokumen cetak. |  |  |
|  | 1. Perusahaan wajib menyimpan dokumen cetak atas kelengkapan dokumen perizinan dan persetujuan yang telah disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |
|  | 1. Perusahaan wajib mempertanggungjawabkan bahwa setiap dokumen yang disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan adalah benar dan sesuai dengan dokumen cetak yang dimiliki oleh Perusahaan. |  |  |
|  | 1. Dalam hal dibutuhkan Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan/atau validasi atas kebenaran dan kewajaran dokumen cetak permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disampaikan oleh Perusahaan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  | 1. Perusahaan wajib menyediakan dokumen cetak permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disampaikan oleh Perusahaan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan pada saat pelaksanaan verifikasi dan/atau validasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). |  |  |
|  | 1. Seluruh dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dan/atau data yang tersimpan dalam pangkalan data (*database*) pada sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kekuatan hukum yang dipersamakan dengan dokumen cetak. |  |  |
|  | 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan secara elektronik (*e-licensing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. |  |  |
|  | 1. Dalam hal Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Perusahaan dikenai sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. |  |  |
|  | 1. Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dan Perusahaan tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | BAB XVI |  |  |
|  | KETENTUAN PERALIHAN |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | Permohonan persetujuan yang telah diterima Otoritas Jasa Keuangan dan yang belum memperoleh persetujuan atau penolakan pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, diproses sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan OJK ini diundangkan dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib menyesuaikan ketentuan tersebut paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Perusahaan yang memiliki anggota Direksi yang masih merangkap jabatan atau pegawai pada Perusahaan Perasuransian dan perusahaan lain, wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dalam jangka waktu 6 (enam) bulan bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Perusahaan yang memiliki anggota Dewan Komisaris yang masih merangkap jabatan pada Perusahaan Perasuransian yang sama dan/atau merangkap jabatan lebih dari 3 (tiga) perusahaan lain yang bukan merupakan Perusahaan Perasuransian yang memiliki bidang usaha yang sama, wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap Perusahaan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, dinyatakan tetap sah dan berlaku. |  |  |
|  | 1. Perusahaan yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi lanjutan sesuai dengan Peraturan OJK ini. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | 1. Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. |  |  |
|  | 1. Dalam hal Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Perusahaan dikenai sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. |  |  |
|  | 1. Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dan Perusahaan tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | BAB XVIII |  |  |
|  | KETENTUAN PENUTUP |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan bagi Perusahaan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai rangkap jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dinyatakan dicabut dan tidak berlaku bagi Perusahaan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Cukup jelas. |  |
|  | Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai ekuitas minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku bagi Perusahaan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Ditetapkan di Jakarta |
| Pada tanggal … |
| KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, |
| Ttd |
| MAHENDRA SIREGAR |

|  |
| --- |
| Diundangkan di Jakarta  pada tanggal … |
|  |
| MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, |
| ttd |
| YASONNA H. LAOLY |

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …